

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Timur – Tengah merupakan sebuah zona konflik yang paling luas dan tercatat paling lama dalam sejarah. Dikatakan paling lama dikarenakan konflik Arab – Yahudi merupakan sebuah konflik yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya dan paling luas dalam artian zona konflik ini merupakan zona yang meliputi suatu kawasan besar dengan peradaban yang juga tergolong besar. Akan tetapi ironisnya konflik ini merupakan sebuah konflik yang memperebutkan sebuah wilayah yang kecil (baca: Palestina) dan juga melawan musuh yang secara kasat mata terlihat kecil akan tetapi menjadi terlalu besar untuk dikalahkan yaitu sebuah perkampungan ilegal Yahudi di sepetak tanah Arab yang lebih dikenal dengan sebutan negara Israel.

Konflik ini telah menyedot perhatian berjuta pasang masyarakat dunia baik kalangan akademisi maupun masyarakat awam yang tertarik dengan serunya konflik yang berlangsung di tanah kelahiran para Nabi tersebut. Kawasan ini juga sekaligus menjadi pusat tiga agama yang secara statistik memiliki penganut paling besar di dunia atau yang lebih dikenal dengan agama samawi. Akan tetapi mengapa darah selalu “melembabkan” keringnya gurun pasir disana, nyawapun terkesan tiada memiliki harga ditempat yang disucikan oleh penganut agama samawi tersebut. Mungkin kita layak bertanya sampai kapan radikalisme

akan menemui ajalnya disana dan sampai kapan konflik bosan menghinggapi kawasan tersebut ?

Mungkin pertanyaan tersebut masih terkesan sangat utopis hingga saat ini, dikarenakan mulai pertengahan Juli 2006 kemaren zionis Israel kembali membangunkan “roh konflik” di kawasan tersebut melalui agresi 34 harinya yang dilancarkan ke sebagian wilayah Palestina dan Lebanon.

Akan tetapi hal lain yang lebih menarik dari konflik ini adalah sulitnya menciptakan sebuah sikap yang padu dikalangan pemimpin negara-negara Arab dalam menimbulkan sebuah sikap yang tegas terhadap eksistensi zionisme di Timur Tengah . Sejarah mencatat bahwa hanya beberapa negara Arab saja yang mau menuangkan konsentrasinya terhadap permasalahan ini yaitu seperti Mesir, Suriah, Yordania dan juga yang pada saat ini Qatar layak disebut sebagai “*new comer*” dalam rangka menengahi konflik Arab Israel.

Sebaliknya negara-negara Arab yang tampaknya “sangat” seperti Libya dan Irak (sebelum invasi AS 2003), ironisnya justru tidak pernah terlibat secara konkrit dalam sekalipun perang Arab-Israel. Apalagi negara-negara Arab monarki kaya minyak di kawasan teluk seperti Arab Saudi dan sebagian anggota GCC (Dewan Kerjasama Teluk) lainnya. Maksimal mereka hanya memberikan dukungan moral dan bantuan finansial yang secara kuantitatif sebenarnya tidak seberapa dibanding pendapatan mereka dari minyak yang begitu berlimpah. Bandingkan misalnya, pendapatan Saudi saja dari minyak yang bisa mencapai enam milyar dolar AS sebulan, dengan sumbangan yang diberikan GCC (Saudi,

Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman dan Bahrain) pada bangsa Palestina yang hanya 120 juta dolar AS per tahun.

Untuk itu, perlu kiranya jika dilakukan pengakajian lebih mendalam guna melacak mengenai sejauh mana peranan yang telah dimainkan oleh negara-negara Arab, terutama pada Agresi Israel 2006 ini yang secara geografis juga merupakan tetangga terdekat Lebanon. Sejauh mana kontribusi yang telah diberikan oleh negara-negara tersebut dalam hal penyelesaian konflik Israel – Hizbullah (Lebanon) yang merupakan bagian integral dari konflik berkepanjangan Arab-Israel. Maka, penulis mencoba untuk lebih jauh mengkaji permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul :

**“ PERAN NEGARA ARAB TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK ISRAEL-LEBANON 2006 ”**

**( Studi Kasus : Korelasi Kekuatan Nasional dan Peran Suriah, Yordania dan Qatar)**

## **B. Latar Belakang Masalah**

Konflik seakan-akan telah menjadi menu utama dalam konstelasi politik di Timur Tengah. Secara garis besar, konflik dikawasan ini bisa dikategorikan menjadi : konflik intra- Arab, dan konflik Arab vs non Arab<sup>1</sup>. Pada kategori pertama, termasuk didalamnya konflik yang berdimensi religio- ideologis (seperti di Lebanon), konflik yang berdimensi politiko-strategis (pertarungan antara kelompok “moderat” vs kelompok “radikal” dikalangan pejuang Palestina dan di

---

<sup>1</sup> Abd. Rahman, Musthafa, *Jejak- Jejak Juang Palestina : Dari Oslo Hingga Intifadah Al Aqsa*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002) hal xx-xxi.

dunia Arab secara keseluruhan), serta konflik yang berdimensi sosio-ekonomis dan geo-politis yaitu, konflik yang bersumber pada jurang kaya–miskin dan masalah perbatasan (konflik Irak – Kuwait, misalnya).

Sedangkan pada kategori kedua (Arab vs non-Arab), sifat konflik lebih multi-dimensional. Konflik-konflik seperti, Arab/Palestina vs Israel, Irak vs Iran, dan Irak vs Suku Kurdi, didalamnya hampir bisa ditemui semua dimensi, baik religio-ideologis, politiko-strategis, geo-politis, maupun sosio-ekonomis. Karenanya konflik pada kategori kedua ini tergolong yang paling “abadi” di Timur Tengah. Satu hal yang paling menarik dalam sejarah Arab modern yaitu, pihak Arab hampir tidak pernah berhasil mengalahkan pihak non-Arab, seperti dalam konflik Arab/Palestina vs Israel atau Irak vs Iran. Jika dilihat dari perjalanan sejarahnya, maka bisa dikatakan bahwa kegagalan Arab melawan kekuatan non-Arab, khususnya Israel, lebih banyak disebabkan karena kelemahan di pihak Arab sendiri yaitu, kesulitan mereka dalam menggalang persatuan. Dalam menjelaskan hal ini, mungkin terlalu banyak contoh yang bisa diberikan.

Penyanderaan seorang serdadu Israel, Gilad Shalit, yang dilakukan oleh para pejuang HAMAS dan kemudian diikuti dengan peyanderaan 2 serdadu Israel lainnya sebagai reaksi yang ditunjukkan oleh para pejuang Hizbullah, Lebanon, terkait aksi brutal yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina dengan dalih menyelamatkan serdadunya yang sedang disandera. Pasca rentetan peristiwa tersebut, secara otomatis Timur Tengah kembali menjadi ladang perang yang semakin berkecamuk karena disulut oleh aksi anarkhis Israel yang mematikan

sekaligus mengubur sendi-sendi hukum Internasional yang telah disepakati dan sangat dihormati oleh sebagian besar masyarakat dunia.

Israel memang dikenal sebagai “biang keladi” dari hampir semua konflik yang saat ini tengah berjalan di kawasan Timur Tengah. Hal ini dapat terus berjalan dan bertahan berkat konsistensi dari komitmen Amerika Serikat yang selama ini bersikap sebagai “joker” dari setiap kebijakan politik yang ditempuh oleh Israel. Persekutuan ini tetap berjalan secara langgeng dikarenakan kepentingan Amerika Serikat yang “setali tiga uang” dengan Israel, oleh karena itu pada saat ini persekutuan “setan” ini seakan-akan tengah menempuh keabadiannya.

Sama halnya dengan agresi yang dilancarkan Israel terhadap Palestina dan Lebanon baru-baru ini juga sepenuhnya mendapat dukungan moril maupun konkrit dari negeri yang dikenal dengan sebutan “kampiun demokrasi” ini, hal ini diperkuat dengan terbongkarnya kasus pengiriman senjata modern AS ke Israel secara diam-diam juga menjadi bukti kuat keberpihakan itu. Pemberitaan koran *New York Times* beberapa waktu lalu makin memperkuat analisis ini. Harian itu memberitakan, Amerika Serikat (AS) mempercepat pengapalan senjata bom berpresisi tinggi ke Israel di saat negara ini melakukan serangan membabi buta ke Lebanon (22/7)<sup>2</sup>.

Peristiwa ini memang bukan yang pertama dalam hal konflik Israel - Arab, namun sejarah mencatat peristiwa tersebut sebagai perang terhebat dengan

---

<sup>2</sup> <http://sinaimesir.com/?pilih=lihat&id=448> Diakses tanggal 20 September 2006, pukul 20.41 WIB

eskalasi serangan yang terus meningkat setiap harinya. Ditaksir kerugian materi mencapai 2,5 Milyar dollar, dengan jumlah korban sebanyak 1.071 jiwa.<sup>3</sup>

Ironisnya saat terorisme Zionis terjadi di depan mata, para pemimpin dunia Arab yang tergabung dalam Liga Arab, seperti Arab Saudi, Mesir, Yordania, Kuwait, dan dan beberapa negara teluk justru mengecam Hamas dan Hizbullah yang dianggap sebagai biang keladi agresi militer Israel. Jangankan berharap mendapat dukungan, beberapa pemimpin Arab tersebut bahkan terbukti mempunyai hubungan mesra dengan negara penjajah itu.

Jika dirunut dalam sejarahnya, memang belum pernah negara-negara Arab bisa bersatu. Ketika ada “musuh bersama” pun mereka sulit bersatu, apalagi jika “musuh bersama” itu tidak ada. Misalnya, dalam menghadapi zionis Israel yang telah berpuluh tahun menjajah bangsa Palestina, negara-negara Arab tidak pernah mampu menggalang persatuan dan kesatuan. Mereka memang “sepakat” membela perjuangan bangsa Palestina melawan penjajahan Israel, namun mereka tidak pernah padu dalam hal melakukannya. Baik dalam perang Arab-Israel 1948,1956,1967,1973 maupun 1982 ( ketika Israel menyerbu Lebanon untuk mengusir PLO) sampai agresi Israel 2002, hanya empat dari 20-an – negara Arab yang selalu/pernah terlibat didalamnya yaitu, Mesir, Suriah, Lebanon dan Palestina. Bahkan hal tersebut tidak jauh berbeda kendati pada saat ini Israel kembali menunjukkan arogansinya dengan melakukan agresi secara masif ke wilayah Palestina dan Lebanon dengan dalih menyelamatkan serdadu mereka

---

<sup>3</sup> <http://sinaimesir.com/?pilih=lihat&id=445> Diakses tanggal 20 September 2006, pukul 21.12 WIB.

yang ditahan oleh para pejuang Hamas (Palestina) dan Hizbullah (Lebanon), karena hanya Suriah yang pada saat ini berani secara terang-terangan dan konkrit membantu perjuangan Pelestina dan Lebanon dalam menentang Israel, hal ini dibuktikan dengan sebuah pernyataan Presiden Suriah, Bashar Assad yaitu, "Kepada yang menuduh Suriah mendukung Hizbullah, kami mengatakan bahwa adalah kehormatan besar bagi kami dan tugas bagi seluruh Arab,"<sup>4</sup>.

Selain itu Qatar juga mulai muncul sebagai kekuatan baru dikalangan negara-negara Arab yang pantas diperhitungkan. Hal ini dikarenakan sikap politik luar negeri Qatar yang akhir-akhir ini cenderung menunjukkan independensi dan konsistensi terutama dalam hal konflik Arab – Israel. Hal ini dapat dibuktikan dengan sikap Qatar yang berani tampil beda dengan rekan-rekan negara teluk lain bahkan dengan Arab Saudi sekalipun yaitu dengan menyatakan dukungannya secara terang-terangan terhadap perjuangan Hizbullah di Lebanon. Bahkan pada saat ini Qatar tercatat sebagai satu-satunya negara Arab yang mengirimkan pasukannya ke Lebanon guna bergabung dalam *peace keeping forces* PBB yang disebut dengan UNIFIL.

Sedangkan Yordania pada saat ini terlihat cenderung mengambil jalur aman, yaitu tidak mau terlalu terlibat dalam aksi lapangan dan lebih mengutamakan menggunakan saluran diplomatik seperti negara-negara Arab sekutu AS lainnya yaitu Mesir dan Arab Saudi. Memang jika ditinjau pasca perang Arab – Israel tahun 1973 peran Yordania memang terkesan menurun dalam

---

<sup>4</sup> <http://sinaimesir.com/?pilih=lihat&id=431> Diakses tanggal 20 September 2006, pukul 21.11 WIB.

hal menengahi konflik Arab – Israel. Oleh karena itu pada saat ini kita bisa melihat kedekatan Yordania dengan Amerika Serikat juga cenderung menggeser posisi dan sikap Yordania terhadap konflik Arab – Israel yang hingga kini urung menemukan penyelesaiannya.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang dapat dikemukakan disini yaitu:

“ Bagaimanakah kebijakan yang diambil oleh negara Arab dalam menjalankan perannya terhadap penyelesaian konflik Israel-Lebanon 2006 ? ”

### **D. Kerangka Dasar Teori**

Untuk mengkaji dan menjelaskan sebuah fenomena sosial, maka kita membutuhkan sebuah instrumen penting dalam hal membantu menganalisa permasalahan tersebut. Untuk itu sebuah teori selalu diibaratkan sebagai sebuah pisau untuk mengupas suatu fenomena sosial. Selain itu konsep juga merupakan suatu bagian penting yang juga dapat membantu seorang analis menjelaskan mengenai suatu peristiwa sosial. Maka, sebagai instrumen yang digunakan sebagai kerangka pemikiran dalam skripsi ini, penulis menggunakan konsep kekuatan nasional (*national power concept*) dan teori peranan (*role theory*). Dimana melalui kerangka pemikiran ini, penulis mencoba untuk menjelaskan bahwasanya kekuatan nasional suatu negara akan mempengaruhi peranan yang dijalankan oleh negara tersebut dalam pergaulan internasional.



## 1. Konsep Kekuatan Nasional (*National Power Concept*)

Konsep Power (*kekuasaan ; kekuatan*) merupakan salah satu konsep yang menempati posisi istimewa dalam studi ilmu hubungan internasional, oleh karena itu banyak diantara ilmuwan hubungan internasional yang tertarik untuk membahas konsep ini dengan berbagai penafsiran masing-masing. Kautilya<sup>5</sup> menafsirkan *power* sebagai “pemilikan kekuatan” (yaitu suatu atribut) yang berasal dari tiga unsur, pengetahuan, kekuatan (*might*) militer dan keberanian. Dalam pengertian yang hampir serupa, Hans.J Morgenthau salah seorang penerus realisme politik Kautilya, memilih mendefinisikan *power* sebagai suatu hubungan antara dua aktor politik, dimana aktor “A” memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan tindakan aktor “B”. Jadi *power* menurut Morgenthau<sup>6</sup> :

“ Bisa terdiri dari apa saja yang menciptakan dan mempertahankan pengendalian seseorang atas orang lain ( dan itu ) meliputi semua hubungan sosial yang mendukung tujuan ( pengendalian ) itu, mulai dari kekerasan fisik sampai ke hubungan psikologis yang paling halus yang dipakai oleh pikiran seseorang untuk mengendalikan orang lain”

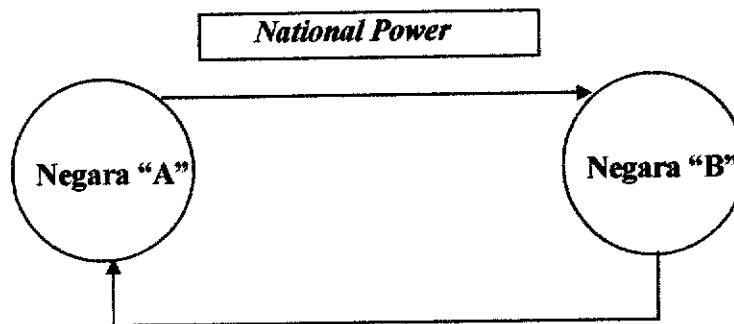
Pengertian *power* menurut Morgenthau tersebut dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Mas'oed, Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, ( Jakarta : LP3ES, 1994 ), hal116.

<sup>6</sup> *ibid.*,hal. 117.

Kerangka Hubungan *National Power* ( Hans.J Morgenthau )<sup>7</sup>



Kadang – kadang konsep kemampuan (*capability*) diterapkan oleh ilmuwan sebagai sinonim dari *power*. Coulumbis dan Wolfe membedakan konsep *capability* dengan *power*. Disini kemampuan didefenisikan sebagai atribut-atribut yang tampak nyata (*tangible*) maupun yang tidak tampak nyata (*intangible*), yang dimiliki oleh negara (atau aktor politik lain) yang memungkinkan aktor itu untuk menerapkan *power* dalam kontaknya dengan aktor-aktor lain.

Adapun menurut Morgenthau, yang tergolong elemen-elemen *tangible* dari *power* mencakup : geografi, sumber daya alam, kemampuan industri, kesiagaan militer dan penduduk. Sedangkan elemen – elemen *intangible*- nya antara lain : karakter dan moral nasional, kualitas diplomasi dan kualitas pemerintah.

Sedangkan menurut Daed Joesoef<sup>8</sup>, dalam jurnalnya mengenai gambaran kekuatan nasional, faktor – faktor yang sangat menentukan didalam pembentukan

---

<sup>7</sup> Soeprapto, R, *Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi dan Perilaku*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1997 ) hal. 117.

<sup>8</sup> Joesoef , Daed dkk, *Analisa 1986-8: Pengamalan Pancasila*, (Jakarta : CSIS,1986) hal. 699.

kekuatan nasional adalah : unsur masif, sistem nasional, kemampuan ekonomi, kekuatan militer, tekad nasional, kecerdasan penduduk dan strategi nasional.

Dari elemen – elemen yang disebutkan, baik menurut Morgenthau maupun Daoed Joesoef terdapat kesamaan antara keduanya, dimana dapat dibagi kedalam kedua kategori yakni, elemen *tangible* dan *intangible*. Namun bila lebih mengacu pada konsep Daoed Joesoef , konsep pembentukan kekuatan nasional lebih kedalam bentuk kuantitatif. Dimana berusaha untuk melakukan penghitungan dengan melakukan pengukuran atas faktor – faktor tersebut diatas.

Dari ketujuh faktor kekuatan nasional menurut Daoed Joesoef tersebut, empat faktor pertama dapat dimasukkan kedalam elemen *tangible*, sedangkan tiga faktor terakhir termasuk kedalam elemen *intangible*. Adapun pengertian – pengertian lebih lanjut mengenai unsur – unsur tersebut adalah sebagai berikut :

**a) *Tangible Elements* ( Unsur – Unsur Yang Terlihat )**

Elemen yang pertama dari konsep *National Power* ini terdiri atas empat bagian :

**(1) Unsur Masif**

Unsur ini merupakan hasil gabungan ( bobot ) dari *wilayah* dan *penduduk*. Cara klasik untuk menilai pentingnya suatu Negara - Bangsa memang melalui tinjauan terhadap dua unsur tersebut. Wilayah ini adalah keseluruhan daerah yang tunduk pada kekuasaan satu pemerintah nasional dalam artian administrasi

internal dan pertahanan eksternal yang batas-batasnya diakui, *de jure* atau *de facto*, oleh lain – lain Negara - Bangsa.<sup>9</sup>

## **(2) Sistem Nasional**

Suatu tata kerja dan tata cara yang logikal untuk mencapai suatu tujuan dapat disebut suatu sistem, dan bila suatu sistem ini diterapkan pada bekerjanya negara untuk mencapai atau mewujudkan cita-citanya, maka sistem tersebut merupakan sistem nasional. Jadi faktor ini mencerminkan derajat kemampuan, walaupun bukan kematangan bangsa berorganisasi. Ia perlu diperhitungkan mengingat, seperti telah dikatakan diatas, istilah majemuk Negara – Bangsa secara esensial hendak menegaskan bahwa “ negara pada dasarnya adalah bangsa yang berorganisasi dan terorganisasi”. Bila demikian, kekuatan nasional ditentukan sekali oleh efisiensi dan efektifitas dari sistem nasional ini.<sup>10</sup>

## **(3) Kemampuan Ekonomi**

Cara yang paling umum dan mudah untuk menaksir kemampuan ekonomi suatu Negara – Bangsa adalah melalui perhitungan jumlah barang dan jasa yang dihasilkannya selama satu atau beberapa periode tertentu, yaitu perhitungan nilai GNP. Namun ia bukanlah cara yang paling tepat untuk melihat derajat kekuatan nasional, karena tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari keterampilan teknologikal penduduk ataupun sumber – sumber daya alam yang ada. Berhubung dengan itu, untuk membuat indeks kemampuan ekonomi nasional seharusnya

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 699-700.

turut juga diperhitungkan produksi dan konsumsi energi (minyak bumi, gas alam, batubara), mineral non – minyak, baja, bahan makanan dan perdagangan luar negeri.<sup>11</sup>

#### **(4) Kekuatan Militer**

Persepsi tentang kemampuan militer dapat dikatakan sebagai sangat subyektif, namun kekuatan militer sering digunakan sebagai usaha terakhir dalam memecahkan konflik antar bangsa. Kekhawatiran bahwa keselamatan negara dan kemerdekaan bangsa sewaktu – waktu dapat terancam merupakan pendorong pokok bagi pembentukan dan pembinaan kekuatan bersenjata. Clausewitz pernah mengatakan bahwa “ perang merupakan lanjutan belaka dari politik dengan negara – negara lain ” dan karenanya “ ia adalah suatu tindakan kekerasan guna mendesak lawan memenuhi kehendak kita “ dengan jalan “ penggunaan habis – habisan dari kekuatan ”.

Unsur kekuatan yang diperhitungkan sebagai komponen dari kemampuan militer ini adala persenjataan nuklir dan kekuatan konvensional. Yang terakhir disebut ini dapat diketahui bobotnya dari anggaran pertahanan dan keamanan, jumlah anggota angkatan bersenjata dan keadaan mental fisiknya, jenis persenjataan, mobilitas pasukan, tingkat penguasaan daratan, lautan serta udara dan doktrin militer yang berlaku.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 700.

<sup>12</sup> *Ibid.*

**b) INTANGIBLE ELEMENTS ( UNSUR-UNSUR YANG TIDAK TERLIHAT )**

Elemen ini terdiri atas tiga unsur, yakni :

**(1) Tekad Nasional**

Faktor kekuatan nasional yang disebut *tekad nasional* dalam dirinya merupakan aspek mental dari pembentukan bangsa. Indeks dari faktor ini mencerminkan derajat kekukuhan “ mental tanah air “. Manusia bergabung satu dengan yang lainnya dalam suatu bangsa karena ada tekad untuk hidup bersama; karena merasa turut bertanggung jawab atas cita – cita bersama jauh diatas tujuan – tujuan hidup pribadi. Memang tidak setiap orang dalam satu bangsa harus menyetujui semua yang dinyatakan sebagai kehendak bersama, namun di masyarakat ada kebutuhan bahwa kecenderungan umum yang dicita – citakan bersama itu jelas gambarannya.<sup>13</sup>

**(2) Kecerdasan Penduduk**

Tingkat kecerdasan penduduk dapat diketahui dri tingkat pendidikan rata – rata warga negara, jumlah pekerja otak ( *knowledge workers* ), jumlah penemuan – penemuan ( *inventions* dan *inventions* ), kegairahan baca – tulis ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan “ *normal science* “. Dari unsur – unsur yang diperhitungkan sebagai komponen pembentukan kecerdasan penduduk

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hal.701.

sebagai faktor kekuatan bangsa, kiranya jelas bahwa faktor ini secara esensial mencerminkan tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>14</sup>

### (3) Strategi Nasional

Adakalanya yang disebut sebagai strategi nasional ini hanya berupa suatu pola tingkah laku yang mencerminkan norma – norma sosial, politik dan budaya yang jelas diterima dan disepakati oleh seluruh warga masyarakat.

Selanjutnya, bobot setiap faktor kekuatan dapat dinyatakan secara kuantitatif. Untuk empat faktor pertama yang terdiri atas unsur masif, sistem nasional, kemampuan ekonomi, dan kemampuan militer; angka indeks terletak antara kemampuan yang terendah 0 dan yang tertinggi 100. Angka 0 sama sekali tidak berkemampuan, sedangkan angka 100 berkemampuan relatif sempurna. Sedangkan untuk ketiga faktor kekuatan lainnya yaitu, tekad nasional, kecerdasan penduduk, dan strategi nasional; angka indeksnya bergerak antara terendah 0 dan tertinggi 1. Angka 0 mencerminkan bangsa yang terpecah belah, tidak mengetahui apa – apa dan strategi, sedangkan angka 1 mencerminkan bangsa yang betul – betul teguh bersatu padu, luar biasa cerdas dan mempunyai strategi yang jelas dan tegas perumusannya.

Jika gambaran kekuatan nasional dinyatakan dengan (Kg), unsur masif adalah (U), sistem nasional adalah (N), kemampuan ekonomi adalah (E), kemampuan militer adalah (M), tekad nasional adalah (t), kecerdasan penduduk

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

adalah (c) dan strategi nasional adalah (s), maka gambaran kekuatan nasional dapat dinyatakan berupa rumus :<sup>15</sup>

$$Kg = (U + N + E + M) X (t + c + s)$$

Dari rumus diatas jelas bahwa ketiga variabel yang terakhir (t, c, s) berfungsi sebagai koefisien penggali (multiplier). Artinya, ketiga faktor kekuatan tersebut dapat meningkatkan, membuat konstan, mengurangi, bahkan meniadakan sama sekali nilai yang dihasilkan oleh keempat faktor pembuat kekuatan pertama (U, N, E, M). Umpamakan bahwa gambaran kekuatan nasional semata-mata ditentukan oleh U, N, E dan M; dan masing-masing faktor bernilai maksimum yakni 100. Maka dari faktor-faktor yang bernilai maksimum yakni 100. Maka, dari faktor-faktor yang bernilai maksimum tersebut kekuatan nasional tersebut dapat dihitung :

$$\begin{aligned} Kg &= (U + N + M) X (t + c + s) \\ &= (100 + 100 + 100 + 100) \\ &= 400 \end{aligned}$$

Nilai ini dapat berubah bila aspek mental dari pembentukan bangsa, yakni tekad nasional (t) dan strategi nasional (s) serta kecerdasan penduduk atau kualitas manusianya (c) juga ikut diperhitungkan. Bila diumpamakan ketiga faktor ideal tersebut juga maksimum sempurna, maka :

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 703.



$$\begin{aligned}
 Kg &= (U + N + M) X (t + c + s) \\
 &= (100 + 100 + 100 + 100) X (1 + 1 + 1) \\
 &= 400 X 3 \\
 &= 1.200
 \end{aligned}$$

Jadi walaupun berbagai kemampuan sudah maksimal, nilai kekuatan nasional sebagai keseluruhan masih dapat ditingkatkan sebanyak tiga kali berkat nilai yang tinggi dari faktor penggali.

Gambaran kekuatan nasional yang bernilai maksimum ini menceritakan suatu Negara – Bangsa yang tidak hanya berwilayah luas, bersumber alam banyak, berpenduduk besar dan berkemampuan tinggi, tetapi juga yang mempunyai strategi nasional yang jelas perumusannya. Dan karena kejelasan itu mendapat dukungan penuh dari penduduknya yang tinggi kecerdasannya serta bersatu secara sosial, psikologikal dan politikal dibelakang pemerintahan nasional. Maka kemampuan yang sudah maksimum itu masih dapat ditingkatkan bobotnya sehingga dalam jangka waktu panjang, walaupun dalam keadaan perang kekuatan nasional tersebut sama sekali tidak akan terganggu karena ia tidak tergantung dari luar. Negara – bangsa yang seperti ini merupakan negara yang benar-benar mandiri dalam pembentukan kekuatan nasionalnya.

Sebaliknya, jika suatu Negara Bangsa terus – menerus dilanda oleh konflik intern karena terpecah belah, sangat terbelakang dan penuh kebingungan strategik, maka nilai dari  $(t + c + s)$  dapat menjadi 0. Bila demikian yang terjadi betapapun

maksimumnya nilai dari  $(U + N + E + M)$ , nilai tersebut menjadi hilang sama sekali. Betapapun besar hasil usaha meningkatkan kemampuan nasional, akhirnya menjadi sia-sia belaka, karena  $400 \times 0 = 0$ . Sudah tentu kasus seperti ini tidak akan ada dalam kenyataan, tetapi pesan yang dikandung oleh perhitungan fiktif ini adalah bahwa dalam jangka pendek kekuatan nasional dapat saja dibina melalui berbagai kemampuan teknologikal yang didatangkan dari luar negeri. Namun dalam jangka panjang, terlebih dalam keadaan dimana hubungan internasional terputus karena peperangan, semua kemampuan impor tersebut lenyap seketika.

Operasionalisasi dari perhitungan tersebut diatas dapat kita analogikan terhadap Suriah, Yordania dan Qatar dimana Qatar merupakan negara yang paling kecil dari segi geografis, akan tetapi bisa saja faktor faktor kekuatan ekonomi yang bagus dapat membuat Qatar memiliki keunggulan tersendiri. Apalagi jika unsur tekad nasional (t), kecerdasan penduduk (c) strategi nasional yang dimiliki Qatar juga lebih besar dikarenakan didukung oleh kondisi perekonomian yang kuat, maka bisa saja hasil perhitungan menunjukkan Qatar memiliki kekuatan nasional yang lebih besar dibandingkan Yordania atau bahkan Suriah yang memiliki wilayah yang jauh lebih luas dibandingkan Qatar. Hal ini mungkin saja terjadi mengingat Qatar merupakan salah satu negara terkaya di dunia dengan GDP perkapita US\$ 53.512 (2006), hal disebabkan karena Qatar merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber daya minyak bumi dan pasokan gas yang sangat banyak.

Oleh karena itu perhitungan kekuatan nasional yang diperkenalkan oleh Daed Yoesoef ini merupakan sebuah perhitungan yang kompleks dimana keseimbangan diantara elemen *tangible* dan *intangible* suatu Negara – Bangsa sangat menentukan dari kuantitas kekuatan nasional negara tersebut.

## 2. Teori Peranan (*Role Theory*)

Peranan (*role*) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Ini adalah perilaku yang dilekatkan pada seseorang yang menduduki suatu posisi. Setiap orang yang menduduki posisi itu, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi itu. Teori peranan menegaskan bahwa<sup>16</sup>, “ *perilaku politik... adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik*”. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh aktor politik.

Menurut John Wahlke<sup>17</sup>, teori peranan memiliki dua kemampuan yang berguna bagi analisis politik. Pertama, ia menunjukkan bahwa aktor politik umumnya berusaha menyesuaikan perilakunya dengan norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Jadi, kegiatan politik individu selalu ditentukan oleh konteks sosialnya. Kerangka berpikir teori peranan memandang individu sebagai seorang yang tergantung pada dan bereaksi terhadap perilaku orang lain. Kedua, teori peranan mempunyai kemampuan mendeskripsikan

---

<sup>16</sup> Heinz Eulau, dikutip dalam, Mas'oed, Mohtar, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi*, (Yogyakarta : Pusat Antar Universitas – Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, 1989) hal.44.

<sup>17</sup> Mas'oed, Mohtar, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi*. (Yogyakarta : Pusat Antar Universitas – Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, 1989) hal.45.

institusi secara behavioral. Dalam pandangan teoritis peranan, institusi politik adalah serangkaian pola perilaku yang berkaitan dengan peranan. Model teori peranan langsung menunjukkan segi – segi perilaku yang membuat suatu kegiatan sebagai institusi. Dengan demikian, teori peranan menjembatani jurang yang memisahkan pendekatan individualistik dengan pendekatan kelompok. Dalam teorisasi peranan kita masih bisa membahas perilaku individu, tetapi perilaku dalam arti peranan, dan peran – peran ini adalah komponen – komponen yang membentuk institusi. Dalam kata lain, institusi bisa didefinisikan sebagai serangkaian peran yang saling berkaitan yang berfungsi mengorganisasikan dan mengkoordinasikan perilaku demi mencapai suatu tujuan.

Melalui teori peranan ini kita dapat menginterpretasikan bahwasanya sikap tegas yang dijalankan oleh Presiden suriah Bashar Assad terhadap Israel adalah merupakan tindakan yang dapat diartikan sebagai peranan Suriah secara institusi, dikarenakan melalui teori ini kita dapat menjembatani jurang pendekatan individualistik dan pendekatan kelompok. Jadi melalui pendekatan ini kita dapat memilah tindakan seseorang selaku pribadi individu tersebut dan tindakan individu yang didasarkan pada harapan atau tuntutan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh seseorang tersebut dalam konteks ini Bashar Assad selaku Presiden Republik Arab Suriah. Selain itu melalui teori ini juga kita dapat memahami tindakan Presiden Suriah tersebut didasarkan konteks sosial yang sedang berlangsung di negara tersebut, atau dengan kata lain sikap keras Suriah terhadap Israel dikarenakan keinginan Suriah untuk kembali merebut dataran

tinggi gholan yang direbut Israel dari Suriah semenjak perang 6 hari pada tahun 1967.

Dalam konteks lain, melalui pendekatan teori peranan ini kita juga dapat memahami tindakan negara Qatar mengirim kurang lebih 300 orang personel militernya untuk bergabung dengan pasukan penjaga perdamaian PBB, UNIFIL adalah dalam rangka menunjukkan kepada negara Arab lain bahwa masih ada negara Arab yang bersedia mengirimkan pasukannya dalam rangka menjamin terjaganya perdamaian di Lebanon pasca agresi Israel ke Lebanon 2006. Jadi kita juga dapat memahami peran yang dijalankan oleh Qatar tersebut merupakan sebuah tuntutan yang harus dijalankan oleh Qatar selaku negara Arab yang ingin menunjukkan peran aktifnya terhadap terciptanya perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Selain itu mungkin kita juga dapat menginterpretasikan sikap dingin Yordania dalam menanggapi konflik Israel - Lebanon 2006 ini adalah dalam rangka menjalankan peranan politik Yordania untuk menjaga *balance of power* dikalangan negara-negara Arab atau dengan kata lain menghindari terseretnya negara-negara Arab kedalam kancah peperangan besar melawan Israel yang pada akhirnya akan merugikan negara Arab itu sendiri. Hal ini sejalan dengan teori peranan yang menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik.

Maka untuk mempermudah pengukuran peran masing-masing negara tersebut maka penulis akan menjabarkan terlebih dahulu jenis peran yang diharapkan akan dijalankan oleh masing masing negara, yaitu :

### 1. Peran Politik

Dalam konteks ini penulis akan melacak sejauh mana peranan yang dijalankan oleh suatu negara (baca : Arab) dalam penyelesaian konflik Israel – Lebanon 2006 dalam hal yang berhubungan dengan aktivitas politik negara tersebut yang meliputi unsur-unsur seperti : diplomasi, kebijakan pemerintah, *bargaining power* serta termasuk dukungan politik yang berasal dari rakyat negara tersebut.

### 2. Peran Militer

Dalam hal ini penulis akan melacak mengenai peran militer yang dijalankan oleh suatu negara dalam rangka penyelesaian konflik Israel - Lebanon 2006 ini. Untuk mengetahui hal itu kita dapat melacak dari instruksi yang dikeluarkan oleh pemimpin tertinggi militer negara tersebut, jumlah pasukan reguler yang dikerahkan, aktivitas militer yang dilakukan ( termasuk keikutsertaan dalam pasukan penjaga perdamaian PBB, UNIFIL).

### 3. Peran Ekonomi

Sebagaimana diatas, dalam konteks ini penulis juga akan melacak peran suatu negara khususnya dalam bidang ekonomi dalam rangka penyelesaian konflik Israel – Lebanon 2006. Untuk mengetahui hal ini maka kita dapat melihat peran yang dijalankan oleh negara tersebut dalam membantu rakyat dan pemerintah Lebanon dalam rangka pemulihan kehidupan sosial-ekonomi pasca Agresi 34 hari Israel ke Lebanon dalam jumlah yang signifikan.

Selanjutnya jenis peranan yang telah dijadikan indeks dalam rangka penghitungan besar-kecilnya peranan suatu negara dimana masing masing faktor akan memiliki angka indeks 0 sampai 5, dimana 0 adalah angka indeks untuk

negara yang tidak menjalankan salah satu faktor peran sedangkan 5 adalah angka indeks untuk negara yang menjalankan faktor peran secara maksimal. Selanjutnya peranan yang dijalankan oleh negara tersebut akan diakumulasikan sesuai dengan jumlah peranan yang dijalankan.

Jika Peran suatu negara dinyatakan dengan (PN), peran politik (P), peran militer (M), peran ekonomi (E), maka gambaran besar kecilnya peran suatu negara dapat dinyatakan dengan rumus :

$$PN = P + M + E$$

Penghitungan dengan metode seperti ini penulis lakukan dalam rangka memudahkan proses analisis terhadap besar-kecilnya peranan yang dijalankan oleh Suriah, Yordania dan Qatar dalam penyelesaian konflik Israel-Lebanon 2006.

Oleh karena itu melalui kerangka pemikiran ini diharapkan nantinya akan dapat membantu melakukan pendekatan terhadap permasalahan korelasi kekuatan nasional dengan peran yang dijalankan oleh suatu negara. Hal ini dapat dilakukan dengan pengukuran terhadap kapasitas kekuatan nasional dan peran masing-masing negara tersebut (Suriah, Yordania, Qatar) yang pengukurannya akan dilaksanakan pada bab berikutnya dalam rangka membuktikan hipotesis dalam penulisan skripsi ini.

### **E. Hipotesa**

Dari permasalahan yang ada dan didukung oleh kerangka pemikiran yang diterapkan maka dapat ditarik hipotesa sebagai berikut :

Negara- negara Arab yang memiliki kekuatan nasional yang besar akan menunjukkan peranan yang lebih besar terhadap penyelesaian kasus agresi Israel ke Lebanon 2006.

### **F. Tehnik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan penulisan data sekunder yaitu dengan melakukan "*library research*" atau penelitian kepustakaan yang meliputi literatur - literatur, buku-buku, jurnal, buletin, artikel, surat kabar, majalah dan informasi yang didapat dari internet. Kemudian sumber-sumber data tersebut diolah secara kualitatif dan kuantitatif.

### **G. Jangkauan Penulisan**

Dalam penelitian ini penulis membatasi penulisan dengan fokus yang dimulai pada saat menjelang terjadinya agresi 34 hari yang dilakukan Israel terhadap Palestina – Lebanon sampai pada proses penyelesaian masalah tersebut, terutama terkait respon yang dikeluarkan negara-negara Arab (Suriah, Yordania, Qatar) terkait peranan dan reaksi konkrit dalam rangka penyelesaian konflik Israel – Lebanon (Hizbullah).



## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan ini penulis membatasi dalam bab - bab yang akan membahas permasalahan-permasalahan yang ada :

BAB I, merupakan Pendahuluan yang berisikan : Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Dasar Teori, Hipotesa, Tehnik Pengumpulan Data, Jangkauan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II, merupakan Pembahasan yang berisikan fakta dan data historis mengenai konflik Arab - Israel.

BAB III, merupakan Pembahasan yang menjelaskan mengenai pengukuran kekuatan nasional negara – negara Arab (Suriah, Yordania, Qatar).

BAB IV, merupakan Pembahasan yang berisikan mengenai pengukuran peran negara – negara Arab terhadap penyelesaian konflik Israel – Lebanon (Hizbullah) 2006.

BAB V, merupakan Kesimpulan.